

## BAB - V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

#### 5.1. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

##### 1. Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama	1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparat, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 1000 lembaga 3) Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 1000 unit
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan, ..... kegiatan
3. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	5) terselesaikannya tata batas antar kabupaten/kota (7 Kab/Kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat) 6) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, ..... kegiatan.
4. Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7) Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah 8) Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
	<p>Kabupaten/Kota.</p> <p>9) Terlaksananya Penilaian dan penghargaan kepada SKPD Provinsi dan Kab/Kota atas prestasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, ..... jenis penghargaan (akumulasi total kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>10) Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda), ..... Perda</p>
5. Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	11) Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum 4 kegiatan
6. Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	12) Terciptanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan pelayanan perijinan satu atap, ..... perda
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	13) Terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif
8. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	14) Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	<p>16) Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 %</p> <p>17) Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan</p> <p>18) Terwujudnya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/lingkungan hidup, ..... kegiatan</p>
11. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	19) Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (e-Planning) untuk mendukung e-Government, 1 Sistem Informasi
12. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	20) Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
13. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	21) Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, luar negeri dan swasta ( <i>public private</i>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
	<i>partnership</i> )

## 2. Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Tercapainya Indeks Pendidikan	1) Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun 98,23 % 2) Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,11 Tahun 3) Angka Putus Sekolah 1,86 % 4) IPM menjadi 76,87
2) Meningkatnya Partisipasi Sekolah	5) APK PAUD 47,61 % 6) APK SD/MI 106,90 % 7) APM SD/MI 94,10 % 8) APK SMP/MTs 92,30 % 9) APM SMP/MTs 75,15 % 10) APK SLTA/MA/SMK 85,26 % 11) APM SLTA/MA/SMK 68 %
3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	12) S1/D-IV 56,60 % 13) Pasca Sarjana (S2/S3) 20 %
4) Peningkatan Sertifikasi Guru	14) Guru bersertifikasi 10.000 Guru (sudah tersertifikasi 235.855 guru dan sisa belum tersertifikasi 27.145 guru)
5) Peningkatan Kesejahteraan Guru	15) Insentif Guru : Rp 900.000/thn/org
6) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda	16) Terselenggaranya kegiatan kemah pertukaran pemuda 1 kegiatan
7) Meningkatnya seni budaya dan prestasi olahraga ditingkat lokal, nasional dan regional	17) Terselenggaranya event seni dan olahraga tingkat nasional 18) Terselenggaranya persiapan atlet untuk pencapaian prestasi olahraga ranking 5 pada Pekan Olah Raga Nasional 2016 19) Tersedianya desain rancang bangun fasilitas keolahragaan berskala internasional, 1 paket

## 3. Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Tercapainya Indeks Kesehatan	1) Rata-Rata Usia Harapan Hidup 71,8 tahun 2) Angka Kematian Bayi 20,5/1000 KH 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 258/100.000 KH 4) Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 21,50 %
2) Layanan Kesehatan Dasar	5) Meningkatnya Cakupan pertolongan

	<p>persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 90 %</p> <p>6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 95 %</p> <p>7) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%</p> <p>8) Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 80 %</p> <p>9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 %</p> <p>10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100%</p> <p>11) Cakupan kunjungan bayi menjadi 95 %</p> <p>12) Persentase Case Detection Rate (CDR) TB, 85 % dan persentase keberhasilan pengobatan 95 %</p> <p>13) Cakupan Puskesmas menjadi Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit</p> <p>14) Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000</p> <p>15) Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700</p>
3) Pelayanan Kesehatan Rujukan	<p>16) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %</p> <p>17) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %</p>
4) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	18) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19) Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %
6) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	20) Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 65 %
7) Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	<p>21) Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota</p> <p>22) Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota</p>
8) Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan	23) Perbaikan sarana sanitasi dasar permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah
9) Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitaliasi Pos Yandu	<p>24) Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di pos yandu 2 kali</p> <p>25) Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 Kali, dan leaflet, sticker, poster, 33 Kab/Kota.</p>

**4. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian**

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	1) Pembangunan/peningkatan jalan provinsi sepanjang <b>247,47 Km</b> 2) Pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang <b>36,50 Km</b> 3) Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang <b>2.838,64 Km</b> 4) Pembangunan/ rehab jembatan <b>691 m</b> 5) Pemeliharaan rutin jembatan <b>12.593,90 m</b> 6) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap <b>82,44%</b> 7) Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema <i>KPS/Public Private Partnership</i>
2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	8) Pembangunan Jalan Produksi 25 km (lebar 3 m) 9) Pembangunan Jalan Usaha Tani 50 km (lebar 3m)
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi lintas wilayah 17.151 Ha 11) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa lintas wilayah sebesar 5.350 Ha
4) Penyediaan dan pengelolaan air baku	12) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 33 embung/waduk
5) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	13) Terlaksananya pengendalian, pengawasan, pengolahan, pemeliharaan dan operasional sumber daya air
6) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	14) Rehabilitasi/perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai/pantai sepanjang 203.694 m
7) Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	15) Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8) Penguatan KPI dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	16) 8 (delapan) Kab/Kota
9) Rumah tangga pengguna air bersih	17) 88,2 %

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
10) Rumah layak huni	18) 1500 unit

**5. Prioritas 5 : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan**

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi rata-rata sebesar 3%, diarahkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.794.985 ton 50,3 kw/hektar</li> <li>3). Produksi jagung mencapai 1.672.076 ton</li> <li>4). Produktifitas jagung mencapai 57,3 kw/hektar</li> <li>5) Produksi kedelai mencapai 15.051 ton</li> <li>6). Produktifitas kedelai mencapai 11,79 kwintal/hektar.</li> </ol> <p>b. Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.101.857,22 hektar.</li> <li>2) Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.570.323,89 ton.</li> <li>3) Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2.57 %</li> <li>4) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha.</li> </ol> <p>c. Sub-sektor Peternakan, dengan target pertumbuhan produksi daging 4,25 %; telur 4,42 %; dan susu sebesar 9,74 %, diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan daging, telur dan susu melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produksi daging 147.463,43 Ton</li> <li>2) Produksi Susu 9090,29 Ton/Tahun</li> <li>3) Produksi telur 145.262.50 Ton/Tahun</li> <li>4) Jumlah Akseptor IB 61.830 ekor</li> <li>5) Jumlah Kelahiran IB 44.518 ekor</li> <li>6) Meningkatkan mutu dan keamanan</li> </ol>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
	<p>pangan (ASUH)</p> <p>7) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya</p> <p>d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produksi Perikanan Tangkap sebesar 463.392 ton</li> <li>2) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 190.927 ton</li> <li>3) Konsumsi ikan per kapita sebesar 40 kg/kapita/tahun</li> <li>4) Ekspor hasil perikanan sebesar 58.726 ton</li> <li>5) Cakupan Bina Kelompok Nelayan 12 %</li> <li>6) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 222 ton</li> </ol>
<p>2) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan energi per kapita minimal 3.876 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 76,98 gram/hari;</li> <li>2) berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 9,61% setiap tahun</li> <li>3) peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.100 kilokalori/hari dan protein sebesar 57,6 gram/hari</li> <li>4) Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 85;</li> <li>5) Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;</li> <li>6) Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;</li> </ol>
<p>3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%</li> </ol>
<p>4) Peningkatan Kesejahteraan Petani,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nilai Tukar Petani 102,58</li> </ol>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
Peternak, Pekebun dan Nelayan	2) NTP peternakan 107,51 3) NTN perikanan/kelautan 110,2 4) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 20,25 %
5) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	1) Luas lahan hutan yang direhabilitasi 3.000 Ha 2) Luas Lahan kritis yang direhabilitasi 2.000 Ha

**6. Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah**

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Riset dan pengembangan Teknologi Tepat Guna	1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi / diseminasi TTG 3 kali 2) Jumlah pelaksanaan kajian TTG 9 kajian
2) Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	3) Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian 4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya

**7. Prioritas 7: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1) 2.290.764 unit
2) Pertambahan jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif	2) 266 KUKM
3) Pertambahan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HaKI, IRT atau Halal	3) 75 UKM
4) Pertumbuhan jumlah koperasi	4) 12.529 unit
5) Pertambahan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	5) 150 unit
6) Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi	6) 680 orang
7) Pertambahan jumlah Volume Usaha Koperasi	8) Rp. 365.741.381.462
9) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	9) 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi) 10) 100 orang tenaga terlatih pariwisata
8) Peningkatan kunjungan wisatawan	11) Peningkatan jumlah kunjungan minimal 10%
12) Kontribusi sub sektor pariwisata	12) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,25 %



Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
13) Meningkatnya ratio elektrifikasi	13) 91,08 %
14) Jumlah daya listrik	14) 2.900 MW

**8. Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin**

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	1) Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 5,69%
2) Penurunan Persentase Penduduk Miskin	2) Persentase penduduk miskin menjadi 10,2%
3) Penciptaan kesempatan kerja baru	3) Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja
	4) Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

**9. Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, yakni :**

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2015
1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	1) Penurunan tingkat kemiskinan koridor sumatera yang menjadi quick wins pada lokasi yang akan di tentukan
2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	2) Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3) Mendorong Terfasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)	
a. Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	4) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2016 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan 5) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80.18%

	<p>6) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05%</li> <li>• Prevalensi balita gizi buruk 2.15%</li> <li>• Prevalensi balita gizi kurang 11,90%</li> </ul> <p>Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 %</li> <li>• 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%</li> </ul>
<p>b. Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar</p>	<p>7) Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100%</li> <li>• Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100%</li> <li>• Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,51%</li> </ul>
<p>c. Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</p>	<p>8) Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100%</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 100%</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100%</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100%</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100%</li> <li>- Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100%</li> <li>- Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57%</li> <li>- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%</li> </ul>
<p>d. Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak</p>	<p>9) Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2016.</p>

	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kematian anak di bawah lima tahun</li> <li>• Tingkat kematian bayi</li> <li>• Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi</li> </ul>
e. Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	<p>10) Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2016.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratio kematian ibu</li> <li>• Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih</li> </ul>
f. Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	<p>11) Pada tahun 2016 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun.</li> <li>• Tingkat prevalensi kontrasepsi</li> <li>• Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS</li> </ul> <p>12) Tahun 2016 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria</li> <li>• Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan.</li> <li>• Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC</li> <li>• Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.</li> </ul>
g. Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	<p>Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.</p> <p>Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan Survei foto udara terhadap luas daratan</li> <li>• Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)e</li> <li>• Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)</li> <li>• Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</li> </ul>

<p>h. Tujuan (8) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)e</li> <li>• Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)</li> <li>• Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</li> </ul>	<p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2016, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan</li> <li>• Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perKotaan dan perdesaan</li> </ul> <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari</li> <li>2) Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 %</li> <li>3) Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34%</li> <li>4) Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 %</li> <li>5) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal</li> <li>6) Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat</li> <li>7) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat</li> <li>8) Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>9) Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat</li> </ol>
<p>5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10) Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca,</li> </ol>
<p>6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11) Terwujudnya penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik</li> <li>12) Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>13) Terwujudnya penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan</li> <li>14) Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi</li> </ol>
<p>7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD – PUG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15) Terbentuknya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG</li> </ol>
<p>8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas</li> </ol>

	<p>otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</p> <p>17) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan</p> <p>18) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>
--	--

## 5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang direncanakan untuk mendukung Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran-2.

## 5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD

Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 8.872.819.033.263,-. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2014), dengan memperhatikan sasaran/target prioritas dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2015, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.  
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2015

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>8,401,757,411,569</b>	<b>3,245,348,159,264</b>	<b>5,156,409,252,305</b>
1	<b>Pendidikan</b>	<b>226,718,751,900</b>	<b>171,531,153,800</b>	<b>55,187,598,100</b>
1	Dinas Pendidikan	226,718,751,900	171,531,153,800	55,187,598,100
2	<b>Kesehatan</b>	<b>430,700,368,532</b>	<b>303,374,529,217</b>	<b>127,325,839,315</b>
1	Dinas Kesehatan	308,113,699,750	207,215,000,000	100,898,699,750
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah	46,879,521,406	20,452,381,841	26,427,139,565
3	Rumah Sakit Haji Medan	75,707,147,376	75,707,147,376	-
3	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>1,699,690,617,005</b>	<b>1,558,354,463,505</b>	<b>141,336,153,500</b>
1	Dinas Bina Marga	1,515,222,571,505	1,448,024,063,505	67,198,508,000
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	184,468,045,500	110,330,400,000	74,137,645,500
5	<b>Penataan Ruang</b>	<b>183,047,557,999</b>	<b>142,467,970,334</b>	<b>40,579,587,665</b>
1	Dinas Penataan Ruang & Permukiman	183,047,557,999	142,467,970,334	40,579,587,665
6	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>36,742,301,930</b>	<b>23,381,566,700</b>	<b>13,360,735,230</b>
1	Bappeda	36,742,301,930	23,381,566,700	13,360,735,230
7	<b>Perhubungan</b>	<b>109,129,296,476</b>	<b>50,788,580,000</b>	<b>58,340,716,476</b>
1	Dinas Perhubungan	109,129,296,476	50,788,580,000	58,340,716,476
8	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>33,100,060,804</b>	<b>20,217,677,754</b>	<b>12,882,383,050</b>
1	Badan Lingkungan Hidup	33,100,060,804	20,217,677,754	12,882,383,050
13	<b>Sosial</b>	<b>104,620,645,694</b>	<b>54,020,645,694</b>	<b>50,500,000,000</b>
1	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	104,620,645,694	54,020,645,694	50,500,000,000
14	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>41,983,201,550</b>	<b>14,160,453,000</b>	<b>27,822,748,550</b>
1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	41,983,201,550	14,160,453,000	27,822,748,550
15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>46,089,360,650</b>	<b>34,115,855,000</b>	<b>11,973,505,650</b>
1	Dinas Koperasi dan UKM	46,089,360,650	34,115,855,000	11,973,505,650
16	<b>Penanaman Modal</b>	<b>49,213,769,325</b>	<b>32,696,713,625</b>	<b>16,517,055,700</b>
1	Badan Penanaman Modal dan Promosi	25,682,674,850	18,000,000,000	7,682,674,850
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	23,631,094,475	14,696,713,625	8,934,380,850
17	<b>Kebudayaan</b>	<b>54,470,724,510</b>	<b>34,595,615,870</b>	<b>19,875,108,640</b>
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54,470,724,510	34,595,615,870	19,875,108,640
18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>	<b>70,100,699,400</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>10,100,699,400</b>
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	70,100,699,400	60,000,000,000	10,100,699,400
19	<b>Kesatuan Bangsa &amp; Politik Dalam Negeri</b>	<b>56,256,979,985</b>	<b>38,420,898,010</b>	<b>17,836,081,975</b>
1	Badan Kesbang Linmas	22,568,791,457	14,619,434,257	7,949,357,200
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	15,984,658,638	12,058,373,163	3,926,285,475
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,703,529,890	11,743,090,590	5,960,439,300
20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>	<b>5,034,645,600,548</b>	<b>540,959,890,144</b>	<b>4,493,685,710,404</b>
1	DPRD	37,603,135,000	-	37,603,135,000
2	KDH & WKDH	8,795,165,100	-	8,795,165,100
3	Sekretariat Daerah	4,335,948,968,039	163,349,577,998	4,172,599,390,041
	<i>BIRO UMUM</i>	40,300,000,000	40,300,000,000	-
	<i>BIRO PERLENGKAPAN</i>	40,589,000,000	40,589,000,000	-
	<i>BIRO PEMERINTAHAN</i>	24,700,000,000	24,700,000,000	-
	<i>BIRO KEUANGAN</i>	23,895,000,000	23,895,000,000	-
	<i>BIRO PEREKONOMIAN</i>	3,500,000,000	3,500,000,000	-
	<i>BIRO BINSOS</i>	10,985,000,000	10,985,000,000	-
	<i>BIRO ORTALA</i>	4,300,000,000	4,300,000,000	-
	<i>BIRO OTDA</i>	4,850,000,000	4,850,000,000	-
	<i>BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</i>	3,700,000,000	3,700,000,000	-
	<i>BIRO PEMBANGUNAN</i>	3,330,577,998	3,330,577,998	-
	<i>BIRO HUKUM</i>	3,200,000,000	3,200,000,000	-
	<i>PPKD</i>	-	-	4,070,599,390,041
4	Sekretariat DPRD	111,854,530,825	97,797,761,925	14,056,768,900
5	Badan Litbang	17,100,950,960	9,489,008,600	7,611,942,360
6	Inspektorat Daerah	38,677,266,050	23,099,603,750	15,577,662,300
7	Kantor Perwakilan Jakarta	18,765,865,352	12,819,808,652	5,946,056,700
8	Dinas Pendapatan	408,232,325,581	200,384,755,753	207,847,569,828
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan	28,610,811,383	16,611,674,758	11,999,136,625
10	Badan Kepegawaian Daerah	22,979,920,658	14,038,408,508	8,941,512,150
11	Sekretariat KORPRI	6,076,661,600	3,369,290,200	2,707,371,400
12	Badan Penanggulangan Narkotika Provsu	-	-	-
21	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>89,321,894,160</b>	<b>68,000,000,000</b>	<b>21,321,894,160</b>
1	Badan Ketahanan Pangan	49,259,122,150	38,000,000,000	11,259,122,150
2	Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian	40,062,772,010	30,000,000,000	10,062,772,010
22	<b>Pemberdayaan Masyarakat &amp; Desa</b>	<b>18,945,487,400</b>	<b>10,491,957,600</b>	<b>8,453,529,800</b>
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18,945,487,400	10,491,957,600	8,453,529,800
25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>56,885,081,833</b>	<b>38,984,560,698</b>	<b>17,900,521,135</b>
1	Dinas Informasi dan Komunikasi	47,397,912,817	32,145,657,022	15,252,255,795
3	Komisi Penyiaran & Informasi Daerah	9,487,169,016	6,838,903,676	2,648,265,340
26	<b>Perpustakaan</b>	<b>60,195,011,868</b>	<b>48,785,628,313</b>	<b>11,409,383,555</b>
1	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	60,195,011,868	48,785,628,313	11,409,383,555
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>471,061,621,694</b>	<b>286,703,422,239</b>	<b>184,358,199,455</b>
1	<b>Pertanian</b>	<b>237,255,008,270</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>87,255,008,270</b>
1	Dinas Pertanian	140,376,276,470	80,000,000,000	60,376,276,470
2	Dinas Perkebunan	56,896,691,150	40,000,000,000	16,896,691,150
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39,982,040,650	30,000,000,000	9,982,040,650
2	<b>Kehutanan</b>	<b>56,350,270,590</b>	<b>15,881,329,600</b>	<b>40,468,940,990</b>
1	Dinas Kehutanan	56,350,270,590	15,881,329,600	40,468,940,990
3	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>49,121,245,895</b>	<b>38,710,828,220</b>	<b>10,410,417,675</b>
1	Dinas Pertambangan dan Energi	49,121,245,895	38,710,828,220	10,410,417,675
5	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>81,175,321,909</b>	<b>64,753,719,019</b>	<b>16,421,602,890</b>
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	81,175,321,909	64,753,719,019	16,421,602,890
7	<b>Industri</b>	<b>47,159,775,030</b>	<b>17,357,545,400</b>	<b>29,802,229,630</b>
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47,159,775,030	17,357,545,400	29,802,229,630

Rumusan Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing

program Prioritas Pembangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.

#### **5.4. KAJIDAH PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2015 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2015 sebagai berikut:
  - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
  - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan



pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 sebagai berikut:
  - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;
  - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
  - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPD Tahun 2015, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
6. Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan wajib menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dan Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang pada Bab-IV dan Bab-V RKPD Tahun 2015.
7. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;



7. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturanperaturan lainnya;
8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.